

IMPLEMENTANSI KEBIJAKAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) STUDI PADA KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Laras Nanda Marjuningtyas

ABSTRASK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro pada Kementerian Koperasi Usaha kecil dan Menengah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu model Grindle. Model ini terdiri dari dua indikator adalah isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan implemetasi (*context of implementation*).

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Adapun Teknik menganalisis data menurut model analisis Miles dan Heberman, yaitu dimana menganalisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BPUM sebagai skema pemulihan ekonomi dengan memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha. Implementasi Kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di KEMENKOP UKM cukup baik, yang melibatkan kepentingan aktor KEMENKOP UKM, Dinas Koperasi, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, dan Perbankan. KEMENKOP UKM sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran sentral mengarah pada Top-Down, dimana seluruh keputusan utama dari peraturan, teknis, penerimaan BPUM. BPUM berpedoman pada PERMENKOPUKM No. 6 Tahun 2020, sedangkan tahun 2021 berpedoman pada PERMENKOPUKM No. 2 Tahun 2021. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi KEMENKOPUKM yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan baik bidang koperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan. Namun, dari indikator manfaat masih banyak pelaku usaha yang menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Indikator sumber daya mengarah pada anggaran yang belum menjangkau semua pelaku usaha mikro dan perbedaan anggaran yang di dapat pada tahun 2020 dan 2021 menimbulkan kecemburuan sosial pada pelaku usaha.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, BPUM, Pelaku Usaha Mikro

IMPLEMENTATION OF AID POLICY FOR MICRO ENTERPRISES (BPUM) STUDY AT THE MINISTRY OF COOPERATIVES, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Laras Nanda Marjuningtyas

ABSTRACT

This research aims to discuss the implementation of the Micro Business Assistance policy at the Ministry of Cooperatives for Small and Medium Enterprises using policy implementation theory, namely the Grindle model. This model consists of two indicators, namely policy content and implementation environment.

The method used is descriptive qualitative using primary data sources and secondary data. Data collection techniques are interview techniques and documentation techniques. The technique for analyzing data is according to the Miles and Heberman analysis model, namely where analyzing data starts from collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The final results of this research show that the BPUM policy is an economic recovery scheme that provides capital assistance to business actors. Implementing the Micro Business Actor Assistance Policy (BPUM) at KEMENKOP UKM is quite good, involving the interests of KEMENKOP UKM actors, Cooperative Services, Districts, Villages, RT, RW and Banking. KEMENKOP UKM as a government institution that has a central role leads to Top-Down, where all the main decisions are from regulations, technicalities, and BPUM revenues. BPUM is guided by PERMENKOPUKM No. 6 of 2020, while 2021 is guided by PERMENKOPUKM No. 2 of 2021. This is in line with the duties and functions of the KEMENKOPUKM as stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2020, namely formulating, establishing, and implementing policies in the fields of cooperatives, micro-businesses, small and medium businesses, and entrepreneurship. However, from the benefit indicators, there are still many business actors who use this assistance for their daily needs. Resource indicators point to a budget that has not reached all micro-business actors. The difference in budgets obtained in 2020 and 2021 has given rise to social jealousy among business actors.

Keywords: Policy Implementation, BPUM, Micro Business Actors